



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**Inspektorat Sidoarjo**  
Where the accountability began 

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi ekonomisnya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, kedepannya laporan kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat structural, pejabat fungsional, maupun pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.



Sidoarjo, 27 Januari 2023  
INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE**

Pembina Utama Muda  
NIP 197009261990031005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
a) Dasar Hukum .....	1
b) Tujuan Penyusunan .....	1
1.2. Gambaran Umum OPD .....	1
a) Struktur Organisasi .....	1
b) Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Aspek Strategis OPD .....	8
a) Sumber Daya Aparatur .....	8
b) Aset Yang Dimiliki .....	10
c) Isu Strategis Yang Dihadapi .....	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1. Perencanaan Strategis .....	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan .....	13
2.3. Perjanjian Kinerja .....	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	16
3.2. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah .....	16

b.	Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah .....	17
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target .....	17
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya .....	19
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah .....	20
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional (jika ada) .....	20
v.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis .....	21
vi.	Evaluasi dan analisis kinerja .....	21
-	Analisis keberhasilan dan kegagalan .....	21
c.	Pengukuran Kinerja Tahunan .....	21
d.	Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan .....	22
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target .....	22
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya .....	25
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah .....	29
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional (jika ada) .....	29
v.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis .....	29
vi.	Evaluasi dan analisis kinerja .....	30
-	Analisis keberhasilan dan kegagalan .....	30

3.3. Analisis Pencapaian Program Pendukung .....	30
3.4. Laporan Realisasi Anggaran .....	31
3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	31
3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	31
a. Efektivitas dan Efisiensi .....	32
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	32
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM .....	33

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Bagan struktur Organisasi ..... 2

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	8
2. Tabel 1.2 Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan ...	9
3. Tabel 1.3 Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .....	9
4. Tabel 1.4 Proporsi pegawai berdasarkan rincian jabatan .....	9
5. Tabel 1.5 Aset Inspektorat Daerah per 31 Desember 2022 .....	10
6. Tabel 2.1 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD .....	11
7. Tabel 2.2 Matrik Reviu Renstra 2022 .....	12
8. Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	13
9. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2022 .....	14
10. Tabel 2.5 Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2022 .....	14
11. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 .....	16
12. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 .....	16
13. Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2022.....	17
14. Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun Terakhir .....	19
15. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dengan Target Jangkah Menengah .....	20
16. Tabel 3.6 Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart Nasional .....	20
17. Tabel 3.7 Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi Sejenis .....	21
18. Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Tujuan .....	21

19. Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 .....	21
20. Tabel 3.10	Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target	
	Sasaran .....	22
21. Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir...	25
22. Tabel 3.12	Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target jangka	
	Menengah .....	29
23. Tabel 3.13	Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan standart	
	Nasional .....	29
24. Tabel 3.14	Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan instansi	
	Sejenis .....	29
25. Tabel 3.15	Analisis Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja	
	Sasaran .....	29
26. Tabel 3.16	Capaian kinerja Program Tahun 2022 .....	30
27. Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	31
28. Tabel 3.18	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....	31
29. Tabel 3.19	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran	
	Tahun 2022 .....	32



## DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 3.1 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2022 .....	17
2. Grafik 3.2 Perbandingan antara capaian kinerja tujuan dengan target Jangka Menengah .....	20
3. Grafik 3.3 Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan target Jangka Menengah .....	22
4. Grafik 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir .....	26

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sidoarjo “**Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan**” melalui misi ke satu (1) yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan 3 sasaran strategis beserta 8 (delapan) Indikator Kinerja terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama dan 5 (lima) indikator kinerja tambahan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 yang merupakan tahun awal Rencana Strategis Tahun 2021-2026, didapatkan capaian kinerja 97% dengan kategori **Berhasil** untuk capaian indikator kinerja utama dan rata-rata capaian kinerja 105,61% dengan kategori **Sangat Berhasil** untuk capaian indikator kinerja tambahan. Keberhasilan capaian ini disebabkan konsistensi APIP dalam menerapkan evaluasi internal kinerja secara berkala sesuai dengan aturan. Konsistensi pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan motivasi pelaksanaan perbaikan menghasilkan buah capaian kinerja yang baik pula. Walaupun demikian masih terdapat kendala/permasalahan baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya komitmen entitas terperiksa untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
2. Masih kurangnya komitmen obyek pengawasan untuk mencukupi data/dokumen pada saat pelaksanaan pengawasan;
3. Belum maksimalnya fungsi SPIP di setiap OPD untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing OPD;
4. Kegiatan pengawasan mandatory yang sering muncul diluar Program kerja pengawasan tahunan yang telah disusun;
5. Masih kurangnya jumlah pegawai secara kualitas di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Di tengah kendala dan permasalahan yang ada kami berupaya untuk memperbaiki sistem kerja baik secara konvensional melalui pembinaan dan

evaluasi kinerja secara berkala maupun digital melalui *e-consulting* dan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengawasan) sebagai berikut :

1. meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk menunjang mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan aspiratif serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat;
2. membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk meningkatkan sistem pelaporan dan capaian kinerja pengawasan dan keuangan;
4. mengoptimalkan profesionalisme tenaga pengawas dan aparatur pengawasan untuk meningkatkan kapabilitas (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Mengoptimalkan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **a) Dasar Hukum**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

#### **b) Tujuan Penyusunan**

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah**

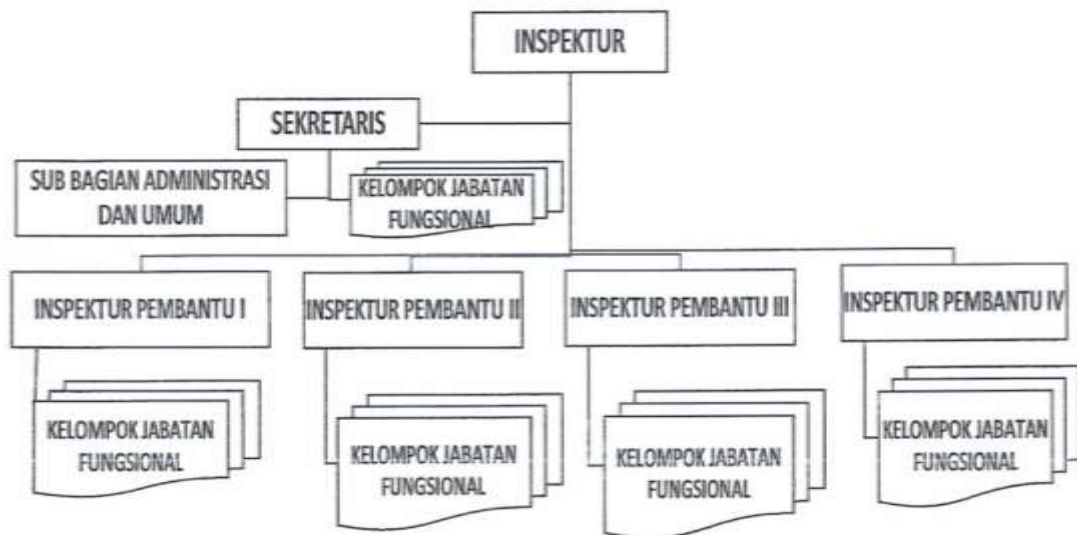
#### **a) Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Inspektur
- 2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Administrasi dan Umum
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari :
  - a) Inspektur Pembantu I, terdiri dari kelompok jabatan fungsional
  - b) Inspektur Pembantu II, terdiri dari kelompok jabatan fungsional
  - c) Inspektur Pembantu III, terdiri dari kelompok jabatan fungsional
  - d) Inspektur Pembantu IV, terdiri dari kelompok jabatan fungsional

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**



b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas :

**“Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Inspektur** mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.
- **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran meliputi:
  1. Pengekoordinasian penyiapan program kerja pengawasan;
  2. Penyusunan anggaran;
  3. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data kinerja;
  4. Penyiapan laporan kinerja dan statistik;
  5. Penyiapan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan administrasi umum, barang, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan meliputi:
  1. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjutnya;
  2. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
  3. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  4. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
  5. Penyiapan laporan hasil pengawasan Inspektorat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi pengelolaan administrasi umum, barang, kepegawaian dan keuangan meliputi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan barang;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pengelolaan urusan keuangan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

➤ **Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan:

- a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
- b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
- e. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krebung dan Desa di wilayah Kecamatan Krebung;
- h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
- j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
- m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman;
- o. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
5. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan;
6. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan asset desa/kelurahan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;



4. Melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal atas kinerja;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
7. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja pemerintah daerah antara lain RPJMD, RENSTRA, RKPD, Renja, LPPD, LKJiP, dan sejenisnya;
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;
9. Melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Melakukan jasa konsulting atas akuntabilitas kinerja;
11. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Akuntansi dan Aset Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap dokumen dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan antara lain KUA PPAS, RKA, LKPD dan sejenisnya;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
6. Melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;

7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah;
8. Melakukan stock opname dan audit operasional/ audit ketaatan;
9. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
10. Melakukan konsultasi atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Investigasi, Pengaduan dan Pencegahan Korupsi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
4. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan penanganan kasus/pengaduan, audit investigasi/ audit PKKN/ audit PKN;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/ MCP dan LHKASN;
7. Melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Whistle Blowing System;

9. Melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
10. Melakukan pengawasan saber pungli;
11. Melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi menjadi kinerja investigasi;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai fungsinya.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

### 1.3 Aspek Strategis OPD

#### a. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Jumlah Pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 82 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Ket.
1.	Pegawai Negeri Sipil	81	
2.	Tenaga Kontrak	1	
	Jumlah	82	

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2022

Tabel 1.2  
Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1.	Golongan IV	1	5	-	7	-	13
2.	Golongan III	-	-	1	28	9	38
3.	Golongan II	-	-	-	20	10	30
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	5	1	55	20	82

Sumber data: Subbag Administrasi dan Umum Desember 2022

Tabel 1.3  
Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	8
2.	Sarjana (S-1)	37
3.	Sarjana Muda	27
4.	SLTA	8
5.	SLTP	2
JUMLAH		82

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2022

Tabel 1.4  
Proporsi Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	4
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Pengadministrasi Umum	2
6.	Pengadministrasi sarana prasarana	1
7.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1
8.	Pengelola Kepegawaian	1
9.	Pengelola Teknologi Informasi	1
10.	Pengelola Gaji	1
11.	Pengelola Data TL Evaluasi dan Pelaporan	2
12.	Pengelola Pengawasan	1
13.	Pengelola Keuangan	1
14.	Bendahara	1
15.	Pengemudi	3
16.	Petugas Keamanan	3
17.	Pramu Bakti	1
18.	Pranata Komputer	1

19.	Auditor Madya	7
20.	Auditor Muda	11
21.	Auditor Pertama	9
22.	Auditor Mahir	3
23.	Auditor Terampil	19
24.	Audiwan	2
25.	Perencana Ahli Muda	1
26.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
27.	Arsiparis Mahir	1
Jumlah		82

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2022

b. Aset Yang Dimiliki

Tabel 1.5

Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Total (Rp)
1.	<b>Aset Lancar</b>	<b>25.263.274,51</b>
	Beban Dibayar Dimuka	8.856.781,51
	Persediaan	16.406.493,00
2.	<b>Aset Tetap</b>	<b>13.461.112.388,12</b>
	Tanah	5.472.578.958,00
	Peralatan dan Mesin	5.759.125.384,00
	Gedung dan Bangunan	7.789.127.035,26
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.795.100,00
	Aset tetap lainnya	12.042.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.459.200,00
	Akumulasi Penyusutan	(5.607.015.289,15)
2.	<b>Aset lainnya</b>	<b>173.548.884,00</b>
	Aset lainnya	1.111.349.172,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(937.800.288)
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>13.659.924.546,62</b>

Sumber data : Neraca Inspektorat per 31 Desember 2022

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan proyek pekerjaan umum;

- 2) Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
- 3) Obrik kurang respon atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan;
- 4) Masih banyak obyek pemeriksaan yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo
- 5) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal pada tingkat OPD;
- 6) Kapabilitas SDM APIP masih perlu ditingkatkan.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. Perencanaan Strategis**

**a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD**

Perencanaan strategis Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

<b>Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>Tujuan RPJMD Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo</b>	<b>Tujuan Renstra Inspektorat Daerah</b>	<b>Sasaran Renstra Inspektorat Daerah</b>
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha	Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengawasan yang efektif	Terlaksananya Pengawasan yang efektif berbasis risiko

*Sumber data : Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026*

**b. Matriks Rencana Strategis**

- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Pengawasan yang efektif.
- Indikator Kinerja : 1. Tingkat Maturitas SPIP (target Tahun 2022 Terdefinisi)
- Tujuan : 2. Indeks Survey Eksternal persepsi Korupsi

Tabel 2.2  
Matrik Reviu Renstra 2022

No	Sasaran Strategis		Definisi Operasional Dan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan					Program Pendukung
	Uraian	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	<i>Infrastruktural</i>	<i>Infrastruktural</i>	<i>Integritas</i>	<i>Integritas</i>	<i>Integritas</i>	<i>Integritas</i>	<p>1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Program penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi</p>
			Untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP diperoleh dari Hasil Quality Assurance (QA) oleh evaluator							

Sumber data : Matriks renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026



## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Target 2022	Kegiatan		Target 2022	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Target		
1	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	Penyelenggaraan pengawasan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu	314 laporan	18,497,599,898,00
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu	36 laporan	
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	8 laporan	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP 2. Nilai RB 3. Nilai IPP 4. Nilai SKM 5. Persentase Serapan anggaran	1. A 2. 36,10 3. B 4. Sangat baik 5. 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	80%	
					Nilai SAKIP Inspektorat	A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	87,5%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	82%	
					Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	77%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,5	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna	151 bh	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	39 unit	

Sumber data : Renja Inspektorat Daerah tahun 2022

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur dengan Bapak Bupati Sidoarjo, sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>			
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Pengawasan yang Efektif	Maturitas SPIP	Terdefinisi
		Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76
2.	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>
<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>			
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	A
		2. Nilai RB	36,10
		3. Nilai IPP	B
		4. Nilai SKM	Sangat Baik
		5. Persentase Serapan Anggaran	90%

Sumber data : PK Perubahan Inspektur tahun 2022

Pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026, pada indikator Maturitas SPIP dengan target Terdefinisi. Untuk indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi dengan target 3,76 dengan pertimbangan capaian tahun lalu 3,71. Sedangkan pada indikator Tingkat Kapabilitas APIP dengan target level 3 (Integrated) dengan pertimbangan tahun sebelumnya tahun 2021 ke bawah masih pada level 2 (infrastructure).

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Inspektur untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikordinasikan oleh Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun.

Tabel 2.5  
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2022

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,033,314,398,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,352,985,500,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	111,300,000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18,497,599,898,00</b>

Sumber data : PK Perubahan Inspektur tahun 2022

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 terurai sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>				
1	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Integrated</i>	100%
<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>				
2	Nilai SAKIP	A	A	100%
3	Nilai RB	36,10	36,12	100,06%
4	Nilai IPP	B	A-	100%
5	Nilai SKM	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
6	Persentase Serapan Anggaran	90%	95,04%	106%

Sumber data : Laporan Hasil Monev Renja Triwulan IV tahun 2022

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

#### a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2022	Realisasi di Tahun 2022	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Pengawasan yang Efektif	Maturitas SPIP	Terdefinisi	terdefinisi	100%
		Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76	*)	*)

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim

#### b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

- i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

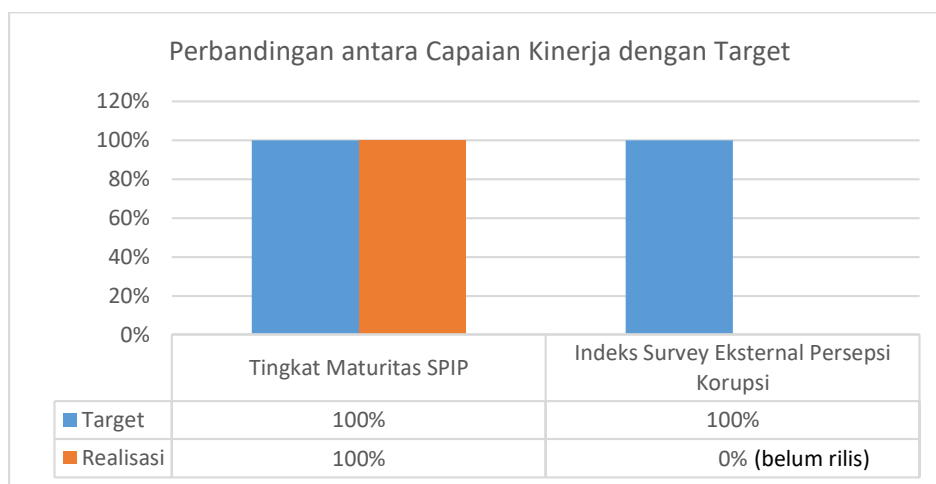
Tabel 3.3  
Perbandingan capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target s.d Tahun 2022	Capaian (%)
1	Maturitas SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	100%
2	Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	*)	3,76	*)

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim

Grafik 3.1

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Tujuan Tahun 2022



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi target, sedangkan untuk indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi belum dapat dihitung capaiannya dikarenakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : B/324/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) tidak rilis sedangkan yang rilis adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

#### **Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian
4. Unsur informasi dan komunikasi
5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Berdasarkan Hasil Penilaian Cepat Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 oleh BPKP provinsi Jawa Timur nomor :

PE.09.003/LHP-880/PW13/3/2022 tanggal 5 Desember 2022 diperoleh nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,400 yang berarti bahwa capaian kinerja telah mencapai target. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Pengendalian telah dibangun dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan organisasi, namun belum pada sasaran strategis OPD maupun Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, serta belum pada risiko kecurangan. Walaupun capaian sudah sesuai target yang ditetapkan, namun permasalahan/kendala masih ada diantaranya :

1. belum seluruh OPD menyusun perencanaan dengan baik, khususnya kualitas sasaran, indikator dan target kinerja
2. monitoring tindak pengendalian (RTP) yang ada masih belum mampu menilai efektivitas pengendalian yang telah dilakukan terhadap pencapaian tujuan.
- 3 register risiko yang dibuat oleh OPD belum mencakup risiko seluruh kegiatan
4. beberapa OPD belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi risiko kemitraan internal dan eksternal yang ditimbulkan akibat adanya hubungan kerja sama lintas sektoral di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengendalian intern, yaitu :

- Melakukan monitoring dan reuiu efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun dan dilaksanakan OPD
- Meningkatkan kualitas pengawasan melalui reuiu, evaluasi, dan pendampingan terkait identifikasi risiko kemitraan yang muncul akibat hubungan kerja sama lintas sektoral.
- Melaksanakan sosialisasi dan implementasi secara masif terkait kegiatan anti korupsi yang mencakup tiga hal yaitu cegah, deteksi, dan respon.

### **Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi**

Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi merupakan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Berikut tren hasil survey eksternal persepsi korupsi :

Tahun	Indeks	Keterangan
2019	3,95	Skala 0 - 4
2020	3,71	Skala 0 - 4

2021	*)	*)
2022	*)	*)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : B/324/RB.06/2022 pada tanggal 7 Maret 2022, Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) tidak rilis dan yang rilis adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Berdasarkan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa terdapat perubahan pengukuran indeks korupsi, yang semula menggunakan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan sebutan Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) berubah menjadi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh KPK. Dengan demikian indeks survey eksternal persepsi korupsi yang menjadi indikator tujuan Inspektorat Daerah tahun 2022 tidak dapat diukur capaian kinerjanya. Adapun upaya perbaikan untuk tahun 2023 adalah mengajukan usulan perubahan renstra agar selaras baik indikator maupun targetnya.

## ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi
2.	Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,71	*)	*)

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim dan LHE RB KemenPAN & RB

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Indikator Maturitas SPIP menunjukkan tren yang stabil dan indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi mulai tahun 2021 tidak rilis.

### Maturitas SPIP

Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo tiga tahun terakhir realisasi pada level terdefinisi, indikator ini realisasinya kategori stabil, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara konsisten telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan.

### Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Pada tahun 2020 Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) pada angka 3,71 dengan menggunakan skala 0-4 yang bersumber dari LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan tahun 2021 pengukuran korupsi menggunakan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang hasilnya diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.5

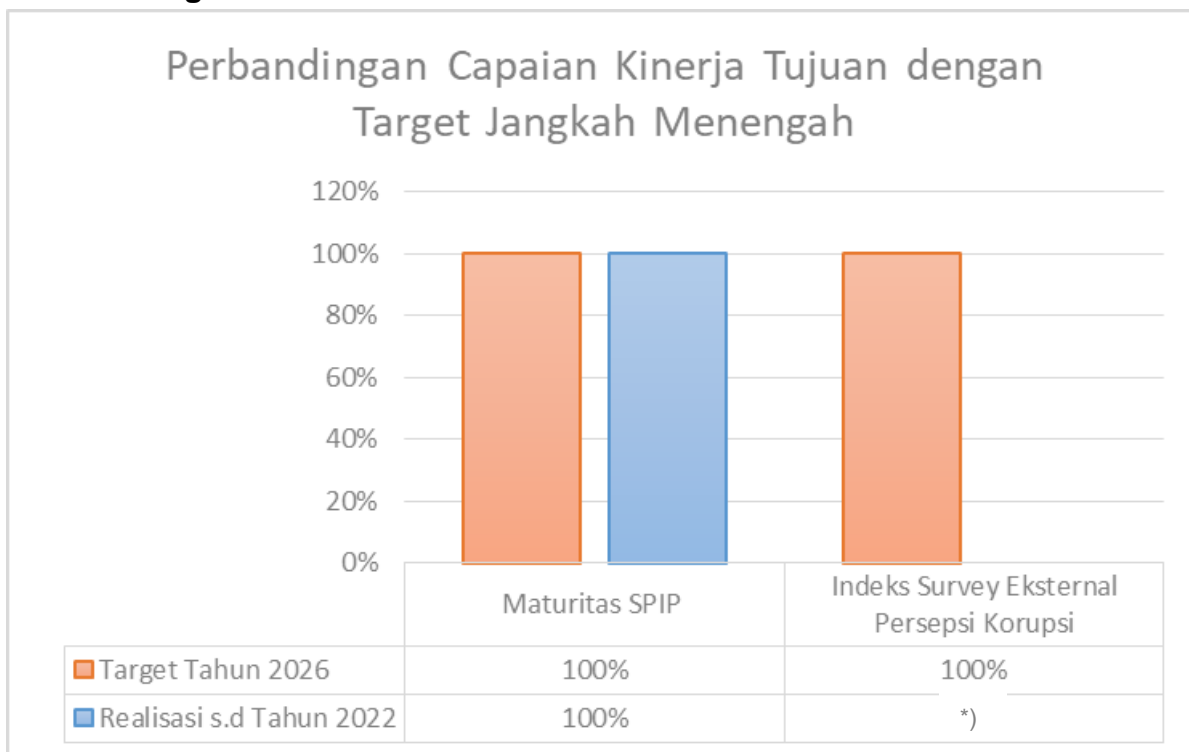
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dengan Target Jangkah Menengah

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Tahun 2026	Capaian (%)
1.	Maturitas SPIP	terdefinisi	terdefinisi	100%
2.	Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	*)	3,95	*)

Sumber data : QA BPKP Provinsi Jatim dan LHE RB KemenPAN & RB

Grafik 3.2

### Perbandingan antara capaian kinerja tujuan dengan target Jangka Menengah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Maturitas SPIP tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikategorikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan indikator Indeks Survey

Persepsi Korupsi belum dapat dihitung capaian kinerjanya dikarenakan LHE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi indikator Survei Eksternal Persepsi Korupsi tidak rilis.

**i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional**

Tabel 3.6  
Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2022	Target Nasional	Capaian (%)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis**

Tabel 3.7  
Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2022	Target Nasional	Capaian (%)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**iii. Evaluasi dan Analisis**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Berdasarkan hasil capaian kinerja atas indikator tujuan tahun 2022, maka dapat disajikan tingkat keberhasilan kinerja tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian (%)	Kategori
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Pengawasan yang Efektif	Maturitas SPIP	100%	Berhasil
		Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	*)	*)

*Ket \*) realisasi belum rilis*

Dari 2 (dua) indikator hanya Tingkat Maturitas SPIP capaian tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori **BERHASIL**, sedangkan untuk indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi belum dapat disajikan karena sampai saat ini nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum rilis.

**b. Pengukuran Kinerja Tahunan**

Pengukuran kinerja sasaran tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan



antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2022 dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2022, sebagaimana pada Renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>					
1.	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Level 3 (3,00) Integrated</i>	<i>Level 2 (2,90) Infrastructure</i>	97%
<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>					
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A	100%
		Nilai RB	36,10	36,12	100,06%
		Nilai IPP	B (3,60)	A- (4,04)	112%
		Nilai SKM	88,50 (Sangat Baik)	97,27 (Sangat Baik)	110%
		Persentase Serapan Anggaran	90%	95,04%	106%

Sumber data : Laporan Hasil Monev Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

**c. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan**

**i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target**

Tabel 3.10  
Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target sasaran

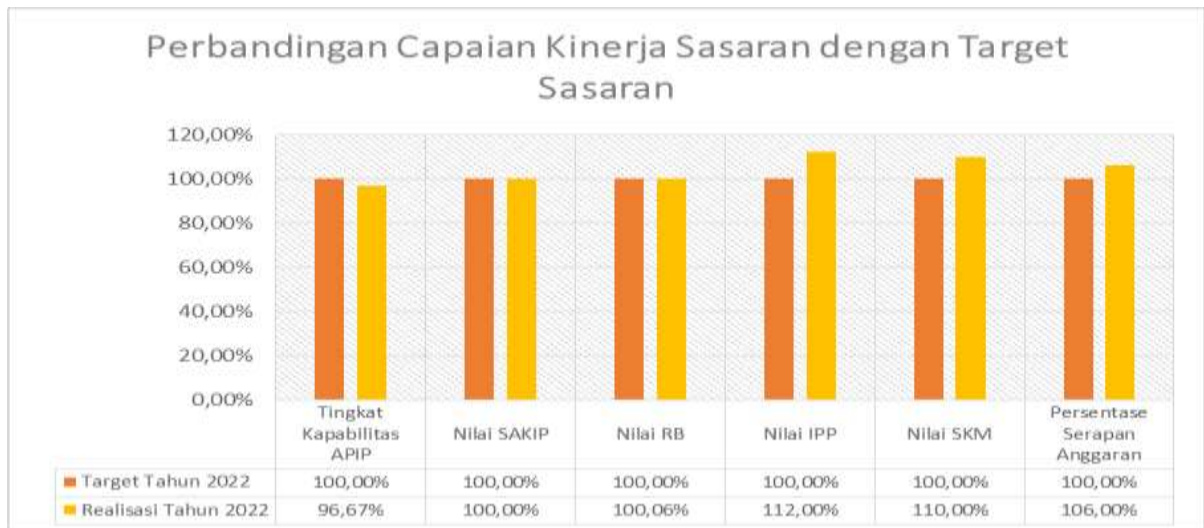
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>				
1	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Level 3 (3,00) Integrated</i>	<i>Level 2 (2,90) Infrastructure</i>	97%
<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>				
1	Nilai SAKIP	A	A	100%
2	Nilai RB	36,10	36,12	100,06%
3	Nilai IPP	B (3,60)	A- (4,04)	112%

4	Nilai SKM	88,50 (Sangat Baik)	97,27 (Sangat Baik)	110%
5	Persentase Serapan Anggaran	90%	95,04%	106%

Sumber data : Laporan Hasil Monev Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

Grafik 3.3

Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan target Jangka Menengah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama 97% dengan kategori **Berhasil**, sedangkan untuk indikator kinerja tambahan dengan hasil rata-rata 105,61% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Berhasil**.

#### **Indikator Tingkat Kapabilitas APIP**

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Berdasarkan hasil laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo oleh BPKP provinsi Jawa Timur nomor : PE.09.03/LHP-900/PW13/6/2022 tanggal 5 Desember 2022, nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah 2,90 ini berarti Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo masih pada level 2 (range 2,00 s.d. 2,99). Tingkat capaian Kapabilitas APIP tahun 2022 sebesar 97% yang masih berada pada level 2 mencerminkan bahwa APIP

Kabupaten Sidoarjo sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi

Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Kapabilitas APIP	Keterangan
2020	Level 2 ( <i>Infrastruktur</i> )	-
2021	Level 2 ( <i>Infrastruktur</i> )	-
2022	Level 2 ( <i>Integrated</i> ) skor 2,90 dari range 2,00 s.d. 2,99	-

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Penilaian Kapabilitas APIP optimal, yaitu :

- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko.
- Memuatkhirkan *risk register* yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

### **Indikator Nilai SAKIP**

SAKIP merupakan alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penilaian SAKIP didasarkan pada 2 komponen yaitu :

1. Nilai LKE SAKIP, dengan bobot 95%
2. Nilai SPIP (hasil penilaian risiko OPD), dengan bobot 5%.

Pada komponen LKE SAKIP meliputi : Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja, dan Capaian kinerja.

Tahun 2022 nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah 84,47 dengan predikat A (memuaskan) peringkat ketiga dari 48 OPD. Ini berarti Inspektorat Daerah sudah dapat mengimplementasikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

### **Indikator Reformasi Birokrasi (RB)**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tahun 2022 nilai Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah adalah 36,12 dengan capaian 100,06% dari nilai 36,10 yang ditargetkan dan menempati peringkat pertama

dari 48 OPD di Kabupaten Sidoarjo, ini menggambarkan bahwa Inspektorat Daerah telah melaksanakan perbaikan dengan sangat baik terkait tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

### ***Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP)***

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan dan Inovasi. Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/660/438.1.1.3/2022 tentang hasil penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik kabupaten Sidoarjo tahun 2022, indeks pelayanan publik (IPP) Inspektorat Daerah adalah 4,04 dengan predikat A- (sangat baik) dan menempati peringkat IV pada kategori Perangkat Daerah Penunjang. Ini membuktikan bahwa Inspektorat Daerah telah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun masih ada kekurangan di beberapa indikator.

### ***Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur pelayanan yang disurvei adalah :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan
9. Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022 secara online melalui portal IKM yang dapat diakses pada <http://ikm.sidoarjokab.go.id/opd/103> didapatkan nilai Indeks 5.84 atau Nilai Konversi 97.27 dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, unsur Persyaratan, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukkan merupakan unsur yang mendapatkan nilai terendah.

**Indikator Persentase Serapan Anggaran**

Serapan anggaran adalah besaran persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 didapatkan besaran persentase serapan anggaran Inspektorat Daerah adalah 95,04% dari total anggaran Rp. 18.497.599.898 telah dibelanjakan sebesar Rp. 17.579.808.533 dengan capaian kinerja pada indikator ini sebesar 106% dari 90% yang ditargetkan.

**ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

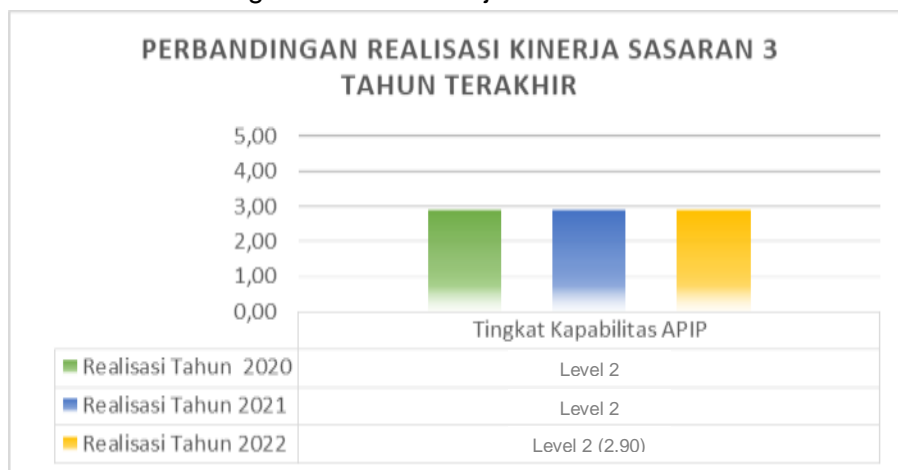
Tabel 3.11  
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir

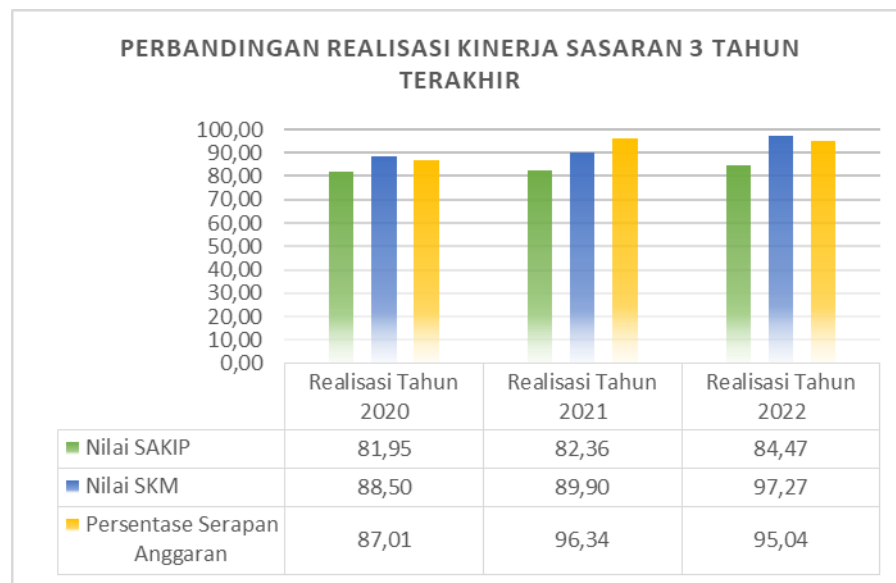
No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
<b>Indikator Kinerja Utama :</b>				
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Infrastructure</i>	<i>Infrastructure</i>	<i>Infrastructure (skor 2,90 dari range 2,00 s.d. 2,99)</i>
<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>				
1.	Nilai SAKIP	A	A	A
2.	Nilai RB	*)	35,09	36,12
3.	Nilai IPP	*)	B-(3,48)	A-(4,04)
4.	Nilai SKM	88,504 (Sangat Baik)	89,90 (Sangat Baik)	97,27 (Sangat Baik)
5.	Persentase Serapan Anggaran	87,01%	96,34%	95,04%

Sumber data : Laporan Hasil Monev Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

Grafik 3.4

Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun terakhir





Dari tabel dan grafik tersebut di atas dapat disampaikan bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran terdapat 5 (lima) indikator dengan realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu indikator Tingkat Kapabilitas APIP, Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, dan Nilai SKM. Satu indikator mengalami fluktuatif yaitu Indikator Nilai Persentase serapan Anggaran.

#### ***Indikator Tingkat Kapabilitas APIP***

Indikator tingkat kapabilitas APIP menunjukkan tren positif selama 3 tahun terakhir. Tahun 2020 sampai dengan 2022 tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 2. Berdasarkan hasil laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo oleh BPKP provinsi Jawa Timur nomor : PE.09.03/LHP-900/PW13/6/2022 tanggal 5 Desember 2022, nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah 2,90 dengan tingkat capaian 97% dari target level 3 skor 3,00 yang ditargetkan.

#### ***Indikator Nilai SAKIP***

Pada indikator ini, 3 (tiga) tahun terakhir ini menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021 nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah 82,36 naik 0,41 digit atau 0,50% dibanding tahun 2020 dengan nilai 81,95. Tahun 2022 nilai SAKIP Inspektorat Daerah adalah 84,47 naik 2,11 digit atau 2,56% dibanding tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah telah konsisten dalam mengimplementasikan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, konsisten dalam melakukan pengukuran kinerja, serta konsisten dalam menumbuhkan kinerja tinggi dan akuntabilitas.

### **Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**

Pada tahun 2022 nilai RB Inspektorat Daerah adalah 36,12 dengan capaian 100,06% dari nilai 36,10 yang ditargetkan. Nilai RB tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,03 digit atau sebesar 2,94% jika dibanding tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah telah melaksanakan perbaikan dengan sangat baik terkait tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

### **Indikator Nilai IPP**

Nilai IPP didapat sejak tahun 2021 dengan nilai 3,48 dengan kategori B minus. Pada tahun 2022 nilai IPP Inspektorat Daerah naik 0,56 digit atau 16,09% dibanding realisasi tahun 2021 yaitu 4,04 dengan kategori A minus. Kenaikan ini dipicu Inspektorat Daerah konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Keseriusan dalam meningkatkan pelayanan pengawasan telah ditunjukkan oleh Inspektorat Daerah, hal ini dapat dilihat dari nilai SKM dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 nilai SKM Inspektorat Daerah adalah 89,90 naik 1,4 digit atau 1,58% dibanding realisasi tahun 2020. Realisasi nilai SKM pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu naik 7,37 digit atau 8,19% dari tahun 2021. Realisasi 97,27 pada tahun 2022 ini dipicu oleh tingkat motivasi APIP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Indikator Persentase Serapan Anggaran**

Pada tahun 2021 persentase serapan anggaran Inspektorat Daerah adalah 96,34 naik 9,33 digit atau 10,71% jika dibanding realisasi tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,3 digit jika dibanding realisasi tahun 2021. Penurunan ini disebabkan belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat efisiensi belanja.

### **iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah**

Tabel 3.12  
Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
	<b>Indikator Kinerja Utama :</b>			
1	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Integrated</i>	<i>Infrastructure (skor 2,90 dari</i>	97%



			<i>range 2,00 s.d. 2,99)</i>	
	<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>			
1	Nilai SAKIP	A	A	100%
2	Nilai RB	36,18	36,12	99,83%
3	Nilai IPP	A (4,55)	A- (4,04)	88,79%
4	Nilai SKM	95,00 (Sangat Baik)	97,27 (Sangat Baik)	102%
5	Persentase Serapan Anggaran	92%	95,04%	103%

Sumber data : Laporan Hasil Monev Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa pada indikator kinerja utama yaitu tingkat Kapabilitas APIP jika disandingkan dengan target jangka menengah (akhir tahun renstra 2021-2026) capaian kinerja berada pada posisi 97% artinya masih berproses untuk menuju target akhir Renstra. Pada indikator kinerja tambahan terdapat 2 (dua) indikator yang sudah melampaui target akhir renstra yaitu indikator nilai SKM dan persentase serapan anggaran, 2 (dua) indikator masih berproses yaitu indikator nilai RB dan Nilai IPP, sedangkan pada indikator nilai SAKIP sudah sesuai dengan target pada akhir Renstra.

#### iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

Tabel 3.13

Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan standart nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional	Capaian (%)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

#### v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 3.14

Perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Realisasi instansi sejenis	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

#### vi. Evaluasi dan Analisis Kinerja

##### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 3.15  
Analisis Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori
		<b>Indikator Kinerja Utama :</b>		
1.	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	97%	Berhasil
		<b>Indikator Kinerja Tambahan :</b>		
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	100%	Berhasil
		Nilai RB	100,06%	Sangat Berhasil
		Nilai IPP	112%	Sangat Berhasil
		Nilai SKM	110%	Sangat Berhasil
		Persentase Serapan Anggaran	106%	Sangat Berhasil

Sumber data : Laporan Hasil Monev Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dengan capaian di atas 100% berkategori **sangat berhasil**, 1 (satu) indikator dengan capaian 100% dengan kategori berhasil dan 1 (satu) indikator dengan capaian 97% dengan kategori berhasil. Jadi dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah 104,18% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

**Tingkat Kapabilitas APIP** pada tahun 2022 capaian belum 100% hal ini disebabkan dari 6 (enam) elemen terdapat 5 (lima) elemen sudah pada posisi level 3 sedangkan 1 (satu) elemen yaitu elemen peran dan layanan masih berada pada level 2. Dari 4 (empat) topik pada elemen peran dan layanan belum sepenuhnya terimplementasikan secara baik dan terus menerus khususnya topik audit kinerja (*Performance auditing*), adapun penyebab audit kinerja belum mencapai level 3 adalah sebagai berikut :

1. audit kinerja dilaksanakan sesuai mandat IAC namun belum memiliki pedoman pelaksanaan audit kinerja.
2. belum melakukan evaluasi atas register risiko pada program yang diaudit.
3. perencanaan audit kinerja belum mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit.
4. audit kinerja dilakukan oleh SDM yang sudah mengikuti pelatihan audit kinerja,

namun diklat yang diikuti belum audit kinerja berbasis risiko.

Adapun upaya perbaikan agar seluruh elemen pada penilaian kapabilitas APIP berada apada level 3 adalah :

1. menyusun pedoman pelaksanaan audit kinerja
2. melaksanakan evaluasi register risiko yang dilaksanakan oleh OPD beserta rencana tindak pengendalian (RTP)
3. meningkatkan kompetensi auditor khususnya diklat audit kinerja berbasis risiko

### 1.3. Analisis Pencapaian Program Pendukung

Untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Daerah pada tahun 2022 didukung dengan 3 program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Capaian kinerja Program Tahun 2022

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A	31%	45,83%	147,84%	Sangat Berhasil
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	86%	92,19%	107,20%	Sangat Berhasil
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	91%	91,33%	100,36%	Sangat Berhasil
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	100% (48 OPD)	100% (48 OPD)	100%	Berhasil
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	76%	75,82 %	99,76%	Berhasil

Sumber data : Laporan Hasil Monev Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja 3 (tiga) program pendukung sasaran strategis jika dirata-rata sebesar 109,19% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan mendukung

ketercapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, namun ada 1 (satu) indikator program yang capaian kinerjanya belum 100% yaitu indikator Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan.

**Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan** pada tahun 2022 teralisasi 75,82% dari 76% yang ditargetkan dengan tingkat capaian sebesar 99,76%. Berdasarkan hasil survey internal yang dilaksanakan 75,82% menyatakan puas dan 24,18% menyatakan tidak puas. Ketidakpuasan ini 85% disebabkan oleh ketersediaan sarana prasarana pengawasan yang kurang memadai, sedangkan 15% disebabkan hal-hal teknis dalam pelayanan publik. Adapun upaya perbaikan agar pada indikator ini capaian dapat meningkat menjadi 100% adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeliharaan BMD secara efektif dan efisien dengan mempertimbangan skala prioritas.
2. Mengevaluasi pemakaian kendaraan dinas operasional agar berjalan dengan baik

#### 1.4. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.17  
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.033.314.398	16.226.260.033	95,26
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.352.985.500	1.244.348.500	91,97
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	111.300.000	109.200.000	98,11
<b>Total</b>	<b>18.497.599.898</b>	<b>17.579.808.533</b>	<b>95,04</b>

Sumber data : LRA Inspektorat Daerah Kab. Sidoarjo per 31 Desember 2022

#### 1.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.18  
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Pengawasan yang Efektif	Maturitas SPIP	Terdefinisi	terdefinisi	100 %	18.497.599.898	17.579.808.533	95,04
	Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76	*)	*)			
Terlaksananya Pengawasan	Tingkat Kapabilitas	Integrated	Infrastructure	97 %			

yang Efektif Berbasis Risiko	APIP						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	A	100 %			
	Nilai RB	36,10	36,12	100,06 %			
	Nilai IPP	B (3,60)	A- (4,04)	112 %			
	Nilai SKM	88,50 (Sangat Baik)	97,27 (Sangat Baik)	110 %			
	Persentase Serapan Anggaran	90%	95,04%	106 %			

## 1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Efektivitas dan Efisiensi

Tabel 3.19  
Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Pengawasan yang Efektif	Maturitas SPIP	104,68%	95,04%	4,96
	Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi			
Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP			
	Nilai RB			
	Nilai IPP			
	Nilai SKM			
	Persentase Serapan Anggaran			

## **2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi sebesar 4,96 efisiensi tersebut disebabkan oleh :

- a. Penyerapan sesuai kebutuhan
- b. Sebagian paket pengiriman dilakukan oleh petugas caraka
- c. Sebagian permasalahan terkait laptop dan komputer dapat diselesaikan oleh tenaga IT dari ASN internal

## BAB IV

### PENUTUP / SIMPULAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo rata-rata 104,18% dengan kategori **sangat berhasil**. Sebagai upaya perbaikan agar tahun berikutnya indikator sasaran dapat meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif, maka upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya pada perangkat daerah dan desa.
- b. Mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko.
- c. Peningkatan kompetensi auditor agar lebih smart dalam menyelesaikan tugasnya.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala agar hambatan-hambatan yang timbul segera dapat diselesaikan.
- e. Mengimplementasikan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengawasan) dengan sasaran tata kelola surat penugasan dan pengelolaan hasil pengawasan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II dan Perubahan
2. Perjanjian Kinerja Eselon III sampai dengan pelaksana dan Perubahan  
<https://bit.ly/PKInspektorat2022-SebelumPerubahan>  
<https://bit.ly/PKInspektorat2022-SetelahPerubahan>
3. Inovasi
4. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022
5. Berita Acara Reviu





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.**

Jabatan : **INSPEKTUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **AHMAD MUDLOR, S.I.P.**

Jabatan : **BUPATI SIDOARJO**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, Februari 2022

Pihak Kedua,  
**BUPATI SIDOARJO**

Pihak Pertama,  
**INSPEKTUR**

  
**AHMAD MUDLOR, S.I.P.**

  
**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197009261990031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT DAERAH**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Indeks survey eksternal persepsi korupsi	3,75
	Maturitas SPIP	Terdefinisi
Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai RB	36,3
	3. Nilai IPP	B
	4. Nilai SKM	Sangat Baik
	5. Persentase penyerapan anggaran	90%


Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.331.177.265
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.435.441.900
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	111.300.000
<b>JUMLAH</b>	<b>17.877.919.165</b>

Sidoarjo, Februari 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI SIDOARJO

Pihak Pertama,  
INSPEKTUR

  
AHMAD MUHDOR, S.P.

  
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197009281990031005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE

Jabatan : INSPEKTUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD MUHDLOR, S.IP.

Jabatan : BUPATI SIDOARJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**BUPATI SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

**AHMAD MUHDLOR, S.IP.**

Sidoarjo, 25 Nopember 2022

Pihak Pertama,  
**INSPEKTUR**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Pengawasan yang Efektif	Maturitas SPIP	Terdefinisi
		Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76
2	Terlaksananya Pengawasan yang Efektif Berbasis Risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	A
		2. Nilai RB	36,10
		3. Nilai IPP	B
		4. Nilai SKM	Sangat Baik
		5. Persentase Serapan Anggaran	90%

**JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022**

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.033.314.398,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.352.985.500,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Aistensi	111.300.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>18.497.599.898,00</b>

Keterangan :

1. Maturitas SPIP : Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), Level 5 (Optimum)
2. Tingkatan kapabilitas APIP : Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), Level 5 (*Optimizing*)

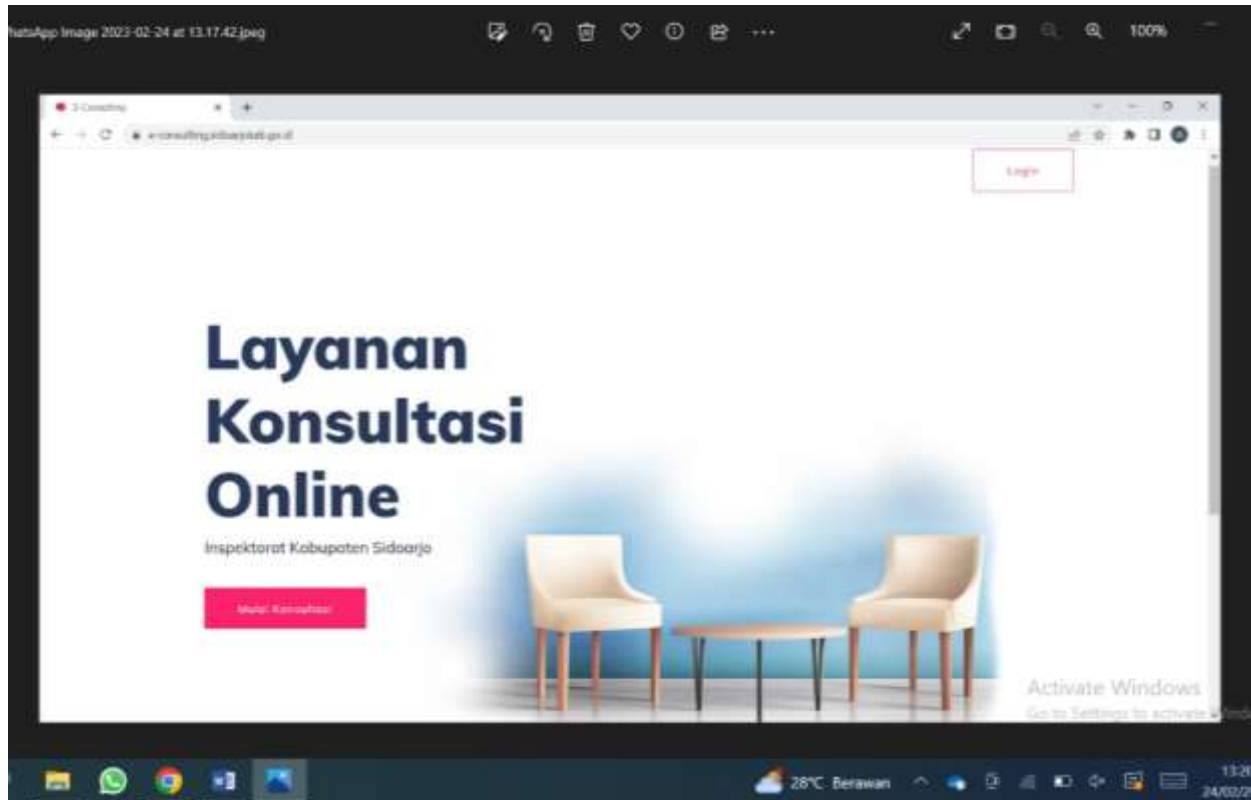
Pihak Kedua,  
**BUPATI SIDOARJO**  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
  
AHMAD MUHDOR, S.IP.  
**AHMAD MUHDOR, S.IP.**

Sidoarjo, 25 Nopember 2022  
Pihak Pertama,  
**INSPEKTUR**  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
  
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE  
NIP. 197009261990031005  
**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19700926 199003 1 005

# INOVASI

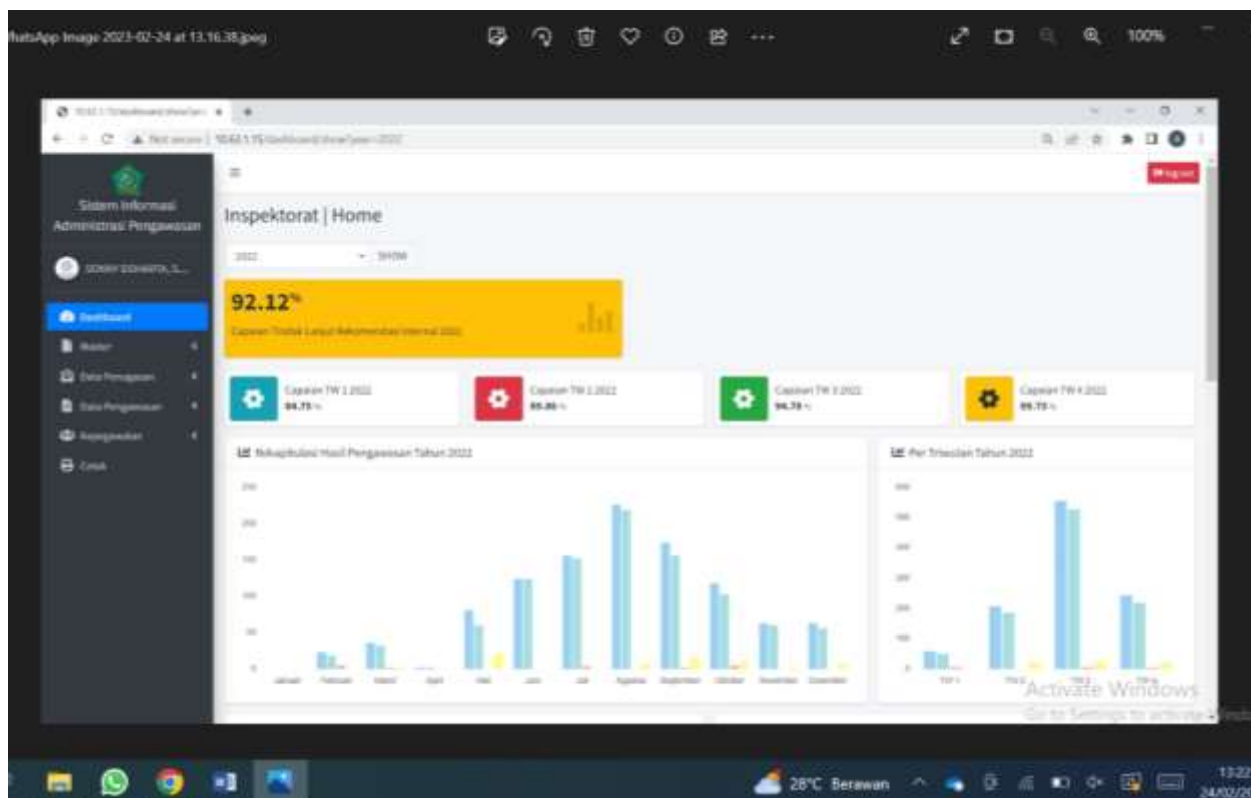
E-Consulting

<https://e-consulting.sidoarjokab.go.id/>



SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pengawasan)

<http://10.63.1.15/>



## PENGHARGAAN TAHUN 2022

### SAKIP PERINGKAT KETIGA



RB PERINGKAT PERTAMA





# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Untung Suropati Nomor. 10  
Telepon.(031) 8948163 ; Fax. (031) 99010187  
Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektorat.sidoarjokab.go.id

## PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Nomor : 050/639/438 . 4/2023

### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 27 Februari 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005



## FORMULIR CHECK LIST REVIEW

NO.		PERNYATAAN	CHECK LIST		DATA PENDUKUNG
			YA	TIDAK	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓		
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓		
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓		
		4. LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan	✓		
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan (M)	✓		
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓		
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓		
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang yang memadai	✓		
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusun LKj	✓		
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓		
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓		
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓		
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya (M)	✓		
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓		
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓		
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓		
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja	✓		
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja Utama	✓		
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓		
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓		
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓		
		9. Jika "tidak" telah mendapat penjelasan yang memadai	✓		

	10. IKU dan IK telah SMART	✓		
--	----------------------------	---	--	--

Sidoarjo, 27 Februari 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005